

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jalan Mayjen. S. Parman No. 02 Kendari (93121)

Nomor Telepon : (0401) 3126053, Fax (0401) 3126182

Website : www.dpmpmsp.sultraprov.go.id

E-mail : dpmpmsp@sultraprov.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Prov. SULTRA Satu Pintu Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP DPMPTSP Prov. SULTRA Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dilaksanakan dalam konteks penyesuaian kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah yang menuntut peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja publik guna mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian DPMPTSP Prov. SULTRA tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal :18 Februari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**



IR. MUHAMMAD NURJAYA, S.T., M.T., IPU
Permbina Utama Muda Gol. IV/c
NIP, 19670106 199703 1 004C

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	5
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	10
BAB III	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	21
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	21
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	24
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	26
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	29

3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	31
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	36
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	38
3.2	Realisasi Anggaran	55
BAB IV	68
PENUTUP	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	6
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah.....	10
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	12
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	14
Tabel 2.7	Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	21
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	24
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	27
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	29
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	31
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	37
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	38
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

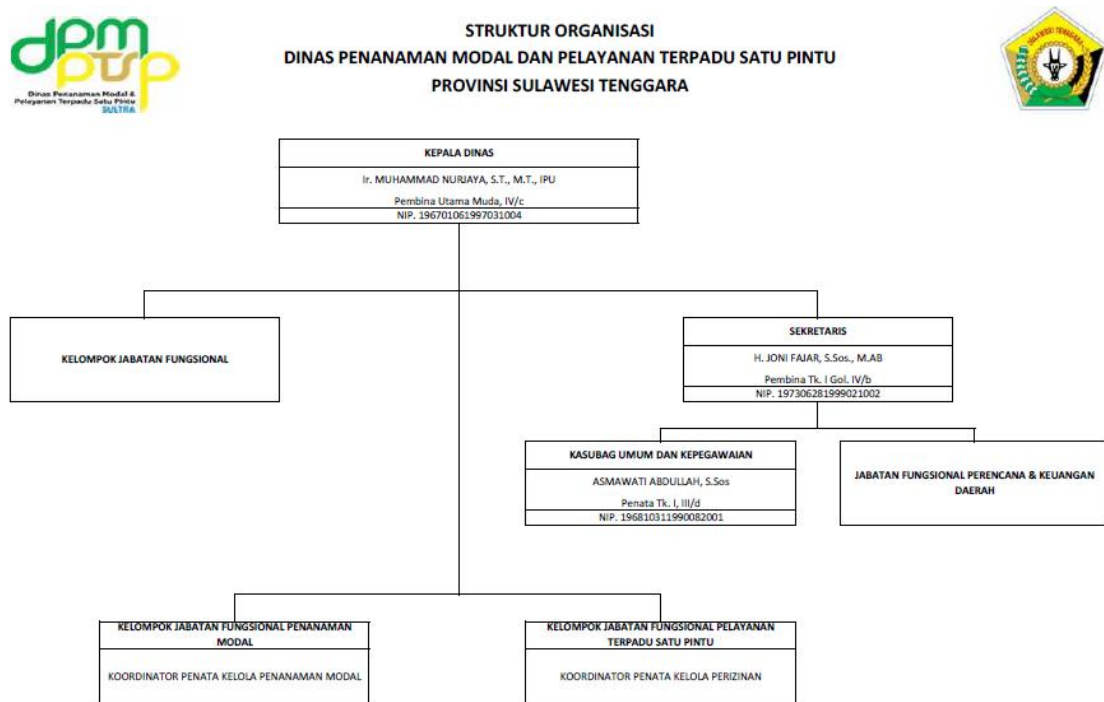
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara



Sumber : DPMPSTP Provinsi Sulawesi Tenggara

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2025	Rp 10.505.869.932,00
APBD	Tahun 2024	Rp 14.000.130.152,00

Sumber : *Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025*

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.5	Meningkatkannya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	1. Meningkatkan 2. Produktivitas 1.1. Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Periode 2025 - 2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	1. 2. 5 #. 6	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pertumbuhan nilai investasi fisik di suatu wilayah dalam satu periode dibandingkan tahun sebelumnya, meliputi pembangunan gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi. Peningkatan persentase PMTB mencerminkan naiknya aktivitas investasi dan kapasitas ekonomi daerah,	Rata-rata persentase kenaikan PMTB 2020-2024= $\frac{9,68+7,28+6,84+0,21}{4} = 6,00\%$ PMTB tahun berikutnya=PMTB tahun sebelumnya $\times(1+6,00\%)$	Badan Pusat Statistik (BPS) — (DPMPSTP) — Bappeda atau BPKAD —
1.2. 5		1. 2. 5 #. 1	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sulawesi Tenggara adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari satu periode ke periode berikutnya	Pertumbuhan PDRB = (PDRB sekarang - PDRB sebelumnya) / PDRB sebelumnya kali 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)
1.2. 5		1. 2. 5 #. 2	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	Persen	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Sulawesi Tenggara adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian di Provinsi Sulawesi Tenggara dari satu	Pertumbuhan PDRB = (PDRB sekarang - PDRB sebelumnya) / PDRB sebelumnya kali 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)

No	Tujuan/ Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				periode ke periode berikutnya		
1.2. 5		1. Pertumbuh an PDRB 2. LU Industri 5 #. Pengolaha 3 n	Persen	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Sulawesi Tenggara adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari satu periode ke periode berikutnya	Pertumbuhan PDRB = (PDRB sekarang – PDRB sebelumnya)/ PDRB sebelumnya kali 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)
1.2. 5		1. Pertumbuh an PDRB 2. LU 5 #. Akomodasi 4 dan Makan Minum	Persen	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum di Sulawesi Tenggara adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara dari satu periode ke periode berikutnya	Pertumbuhan PDRB = (PDRB sekarang – PDRB sebelumnya)/ PDRB sebelumnya kali 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)
1.2. 5		1. Pertumbuh an PDRB 2. LU 5 #. Perdagang 5 an	Persen	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan di Sulawesi Tenggara adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor Perdagangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari satu periode ke periode berikutnya	Pertumbuhan PDRB = (PDRB sekarang – PDRB sebelumnya)/ PDRB sebelumnya kali 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)
1.2. 5.1	Meningkatnya	1. Persentase 2. Peningkata	Persen	Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN	%Peningkatan = <i>(Realisasi</i>	Badan Koordina

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	5. 1 # 0. 1	n investasi PMA dan PMDN		adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kenaikan atau penurunan nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.	$\frac{\text{Investasi Tahun } n - \text{Realisasi Investasi Tahun } n-1}{\text{Realisasi Investasi Tahun } n-1} \times 100\%$	si Penanaman Modal (BKPM) atau kini disebut Kementerian Investasi /BKPM
1.3. 3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	1. 3. 3 #. 1	Nilai AKIP	Nilai	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah skor atau hasil evaluasi yang diberikan kepada instansi pemerintah atas tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi.	Nilai AKIP = Nilai Perencanaan Kinerja + Nilai Pengukuran Kinerja + Nilai Pelaporan Kinerja + Nilai Evaluasi Internal + Nilai Capaian Kinerja	LHE Kemen PANRB
1.3. 3		1. 3. 3 #. 2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintah berdasarkan pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, serta sistem pengelolaan pengaduan	$IPP = \sum((\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot Aspek}))$	LHE Kemen PANRB

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	1.2. 1.1 Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Persen	20.18

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.5	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	6
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.04
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	6.55
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	13.63
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	4.45
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	3.9
1.2.5.1	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	20.18
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Nilai AKIP	89.8
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	3.57

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.5 .1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	81.58
1.2.5 .1.1. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14
1.2.5 .1.1. 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37
1.2.5 .1.1. 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5
1.2.5 .1.1. 1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113
1.2.5 .1.1. 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3
1.2.5 .1.1. 1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12
1.2.5 .1.1. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0
1.2.5 .1.1. 1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.2.5 .1.1. 1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	6

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.2.5 .1.1. 1.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0
1.2.5 .1.1. 1.5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0
1.2.5 .1.1. 1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12
1.2.5 .1.1. 1.6	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0
1.2.5 .1.1. 1.7	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0
1.2.5 .1.1. 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1
1.2.5 .1.1. 2.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1
1.2.5 .1.1. 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1
1.2.5 .1.1. 3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.5 .1.1. 3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0
1.2.5 .1.1. 3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
1.2.5 .1.1. 3.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5
1.2.5 .1.1. 3.5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	0
1.2.5 .1.1. 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	45
1.2.5 .1.1. 4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
1.2.5 .1.1. 4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2
1.2.5 .1.1. 4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0
1.2.5 .1.1. 4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2
1.2.5 .1.1. 4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3
1.2.5 .1.1. 4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14
1.2.5 .1.1. 4.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.5 .1.1. 4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
1.2.5 .1.1. 4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0
1.2.5 .1.1. 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5
1.2.5 .1.1. 5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1
1.2.5 .1.1. 5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0
1.2.5 .1.1. 5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8
1.2.5 .1.1. 5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1
1.2.5 .1.1. 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9
1.2.5 .1.1. 6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2
1.2.5 .1.1. 6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3
1.2.5 .1.1. 6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4
1.2.5 .1.1. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3
1.2.5 .1.1. 7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.5 .1.1. 7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23
1.2.5 .1.1. 7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
1.2.5 .1.1. 7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
1.2.5 .1.1. 7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0
1.2.5 .1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	20.18
1.2.5 .1.2. 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0
1.2.5 .1.2. 1.1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0
1.2.5 .1.2. 1.2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0
1.2.5 .1.2. 1.3	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0
1.2.5 .1.2. 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1
1.2.5 .1.2. 2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum	1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penanaman Modal Daerah Provinsi	
1.2.5 .1.2. 2.2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0
1.2.5 .1.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	19.71
1.2.5 .1.3. 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	5
1.2.5 .1.3. 1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1
1.2.5 .1.3. 1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Provinsi	1
1.2.5 .1.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	28.15
1.2.5 .1.4. 1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3
1.2.5 .1.4. 1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10
1.2.5 .1.4. 1.2	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.5 .1.4. 1.3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	40
1.2.5 .1.4. 2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0
1.2.5 .1.4. 2.1	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0
1.2.5 .1.4. 2.2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0
1.2.5 .1.4. 2.3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Provinsi bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	0
1.2.5 .1.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100
1.2.5 .1.5. 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN	13.28

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.5 .1.5. 1.1	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50
1.2.5 .1.5. 1.2	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22
1.2.5 .1.5. 1.3	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0
1.2.5 .1.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	0
1.2.5 .1.6. 1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	0
1.2.5 .1.6. 1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.5	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	6	5.79	96,50	Sangat Tinggi	Badan Pusat Statistik (BPS)
1.2.5	Meningkatnya produktivitas	Pertumbuhan PDRB LU	4.04	3.74	92,57	Sangat Tinggi	BPS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ekonomi sektor unggulan daerah	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	6.55	6.37	97,25	Sangat Tinggi	BPS
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	13.63	14.91	109,39	Sangat Tinggi	BPS
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	4.45	13.42	301,57	Sangat Tinggi	BPS
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	3.9	6.36	163,08	Sangat Tinggi	BPS
1.2.5 .1	Meningkatnya iklim investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	20.18	162.13	803,42	Sangat Tinggi	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau kini disebut Kementerian Investasi/BKPM
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	89.8	70.05	78,01	Tinggi	LHE Kemen PANRB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	yang adaptif, akuntabel dan berintegritas						
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	3.57	3.57	100	Sangat Tinggi	LHE Kemen PANRB

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPSTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tahun pelaporan, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sasaran Strategis 1.2.5 menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Peningkatan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditargetkan sebesar 6 persen dengan realisasi 5,79 persen atau capaian 96,50 persen (kategori Sangat Tinggi). Pada saat yang sama, produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah juga menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta perdagangan secara umum berada pada kategori Sangat Tinggi, bahkan beberapa sektor melampaui target secara signifikan, khususnya industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta perdagangan. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah yang didukung oleh iklim investasi yang relatif kondusif.

Selanjutnya, pada Sasaran Strategis 1.2.5.1 terkait peningkatan iklim investasi PMA dan PMDN, realisasi investasi menunjukkan kinerja yang sangat signifikan. Dari target peningkatan sebesar 20,18

persen, realisasi mencapai 162,13 persen dengan tingkat capaian 803,42 persen (kategori Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan investor terhadap potensi dan peluang usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lonjakan realisasi investasi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

Adapun pada Sasaran Strategis 1.3.3 terkait transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas, Indeks Pelayanan Publik berhasil melampaui target dengan capaian 100,28 persen, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan meningkat. Sementara itu, Nilai AKIP mencapai 78,01 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masih memerlukan upaya perbaikan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, mayoritas indikator kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi, yang menggambarkan bahwa DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kinerja yang efektif dalam mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realias i	Realisa si	Realisa si	Targe t	Realis asi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	0,64	2,86	2,09	6	5.79	96,50
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,78	4,31	3,85	4.04	3.74	92.57
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	1,50	8,01	6,24	6.55	6.37	97.25
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	16,81	12,81	12,98	13.63	14.91	109.39
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	8,34	5,18	4,24	4.45	13.42	301,57
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	7,78	4,96	3,71	3.9	6.36	163.08
1.2. 5.1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	-27.72	-28,87	-23.05	20.18	162.13	803,42

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realias i	Realisa si	Realisa si	Targe t	Realis asi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3. 3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Nilai AKIP	76.57	75.90	75.94	89.8	70.05	78.01
1.3. 3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	3.77	3.04	2.84	3.57	3.57	100

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB, Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan perbandingan antar waktu, pada sasaran *Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah* terlihat dinamika yang fluktuatif namun cenderung membaik pada Tahun (N). Persentase Peningkatan Investasi/PMTB sebesar 5,79% pada Tahun (N) meningkat signifikan dibanding Tahun (n-1) sebesar 2,09%, Tahun (n-2) sebesar 2,86%, dan Tahun (n-3) sebesar 0,64%, menunjukkan akselerasi pembentukan modal tetap bruto.

Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,74% pada Tahun (N) sedikit menurun dibanding Tahun (n-1) sebesar 3,85% dan Tahun (n-2) sebesar 4,31%, serta lebih rendah dibanding Tahun (n-3) sebesar 6,78%, sehingga sektor ini menunjukkan tren perlambatan.

Sebaliknya, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 6,37% relatif stabil dibanding Tahun (n-1) sebesar 6,24%, namun lebih rendah dari Tahun (n-2) sebesar 8,01% dan lebih tinggi dari Tahun (n-3) sebesar 1,50%.

Pada sektor Industri Pengolahan, realisasi 14,91% pada Tahun (N) meningkat dibanding Tahun (n-1) sebesar 12,98% dan Tahun (n-2) sebesar 12,81%, meskipun masih di bawah capaian Tahun (n-3) sebesar 16,81%.

Pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan lonjakan sangat signifikan menjadi 13,42% dibanding Tahun (n-1) 4,24%, Tahun (n-2) 5,18%, dan Tahun (n-3) 8,34%. Hal yang sama terjadi pada sektor Perdagangan yang meningkat menjadi 6,36% dibanding Tahun (n-1) 3,71%, Tahun (n-2) 4,96%, dan Tahun (n-3) 7,78%.

Indikator Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan sangat drastis, dari pertumbuhan negatif pada Tahun (n-3) -27,72%, Tahun (n-2) -28,87%, dan Tahun (n-1) -23,05%, menjadi pertumbuhan positif 162,13% pada Tahun (N), menunjukkan pemulihan dan ekspansi investasi yang sangat kuat.

Pada sasaran tata kelola pemerintahan, Nilai AKIP Tahun (N) sebesar 70,05 menurun dibanding Tahun (n-1) 75,94, Tahun (n-2) 75,90, dan Tahun (n-3) 76,57. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,57 meningkat dibanding Tahun (n-1) 2,84 dan Tahun (n-2) 3,04, meskipun sedikit lebih rendah dibanding Tahun (n-3) sebesar 3,77.

Secara umum, kinerja sektor unggulan ekonomi pada Tahun (N) menunjukkan tren peningkatan signifikan dibanding tiga tahun sebelumnya, khususnya pada indikator investasi dan sektor jasa, meskipun masih terdapat beberapa indikator tata kelola yang perlu diperkuat.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan

strategis D Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5.79	6	96,50
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.04	4.04	92.57
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	6.55	6.55	97.25
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	13.63	13.63	109.39
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	4.45	4.45	301,57

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	3.9	3.9	163.08
1.2.5.1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162.13	20.18	803,42
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Nilai AKIP	70.05	89.8	78.01
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	3.57	3.57	100

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB, Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	5.79	5.39	107,42
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.04	5.14	78,60
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	6.55	-1.31	784%
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	13.63	5.40	252,41%
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	4.45	Tidak ada data Nasional (Mungkin Terlalu Kecil)	445
1.2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	3.9	6.07	64.25
1.2. 5.1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162.13	12,7	1276.61

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Nilai AKIP	70.05	73,61	78.01
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	3.57 (skala 4)	4,02 (skala 5, tahun 2024)	110.94

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Persentase Peningkatan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	6	5.79	96,50	Capaian belum memenuhi target (selisih 0,21%). Dipengaruhi oleh perlambatan	Percepatan fasilitasi perizinan, pengawasan proyek strategis daerah,

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						realisasi proyek fisik dan penyesuaian investasi swasta pada triwulan akhir tahun.	dan peningkatan promosi investasi berbasis sektor unggulan.
1. 2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.04	3.74	92.57	Tidak mencapai target. Dipengaruhi faktor cuaca, fluktuasi harga komoditas, serta produktivitas yang belum optimal.	Penguatan hilirisasi komoditas, peningkatan akses pembiayaan dan teknologi bagi pelaku usaha sektor primer.
1. 2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	6.55	6.37	97.25	Hampir mencapai target. Dipengaruhi stabilisasi produksi dan dinamika harga	Optimalisasi pengawasan investasi tambang dan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						komoditas tambang global.	mendorong peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan.
1. 2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	13.63	14.91	109.39	Melampaui target. Didukung peningkatan investasi smelter dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.	Penguatan kemudahan berusaha dan percepatan realisasi investasi sektor industri prioritas.
1. 2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	4.45	13.42	301,57	Capaian sangat tinggi akibat pemulihan mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan wisata dan event daerah.	Penguatan promosi pariwisata daerah dan penyederhanaan perizinan usaha

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							jasa akomodasi dan kuliner.
1.2.5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	3.9	6.36	163.08	Melampaui target. Didukung peningkatan daya beli masyarakat dan kelancaran distribusi barang.	Digitalisasi perdagangan UMKM dan fasilitasi kemitraan usaha.
1.2.5.1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	20.18	162.13	803,42	Capaian sangat signifikan akibat realisasi investasi skala besar pada sektor industri pengolahan dan pertambangan.	Penguatan sistem OSS, percepatan layanan perizinan, dan promosi investasi terarah pada investor strategis.
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintah	Nilai AKIP	89.8	70.05	78.01	Tidak mencapai target. Dipengaruhi belum	Penyempurnaan perencanaan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	han yang adaptif, akuntabel dan berintegritas					optimalnya cascading kinerja, eviden dokumen, dan penguatan manajemen risiko.	berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas SDM perencana
1. 3. 3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	3.57	3.57	100	Target tercapai. Kualitas pelayanan relatif stabil dengan standar pelayanan yang konsisten.	Peningkatan inovasi pelayanan digital dan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, kinerja pada Sasaran *Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah* menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tertinggi terjadi pada sektor Akomodasi dan Makan Minum (301,57%) serta peningkatan investasi PMA dan PMDN (803,42%) yang didorong oleh realisasi investasi skala besar dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Namun demikian, beberapa indikator belum mencapai target, yaitu PMTB (96,50%), sektor Pertanian (92,57%), sektor Pertambangan (97,25%), serta Nilai AKIP (78,01%). Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan kondisi produksi, serta faktor internal berupa belum optimalnya pengelolaan kinerja.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik mencapai 100% dari target, menunjukkan kualitas pelayanan yang stabil dan sesuai standar. Secara keseluruhan, kinerja tahun berjalan menunjukkan tren positif terutama pada sektor investasi dan hilirisasi industri, meskipun masih diperlukan penguatan tata kelola dan konsistensi pencapaian pada seluruh indikator.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. 2. 5	Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	6	5.79	96,50	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 2. 5		4.04	3.74	92.57	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 2. 5		6.55	6.37	97.25	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 2. 5		13.63	14.91	109.39	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 2. 5		4.45	13.42	301,57	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 2. 5		3.9	6.36	163.08	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 2. 5. 1	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	20.18	162.13	803,42	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 3. 3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	89.8	70.05	78.01	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien
1. 3. 3		3.57	3.57	100	10.505.869.932	9.431.602.974	89.77	Efisien

Sumber : BPS, BPSM, LHE KemenpanRB Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel capaian kinerja, Sasaran 1.2.5 *Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah* secara umum

menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sebagian besar indikator mencapai dan bahkan melampaui target, dengan capaian tertinggi sebesar 301,57% dan 163,08%. Secara agregat, capaian sasaran mencapai 803,42%, yang menunjukkan peningkatan produktivitas sektor unggulan yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan.

Pada Sasaran 1.3.3 *Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas*, capaian kinerja berada pada kategori baik, dengan satu indikator mencapai 100% dan satu indikator lainnya sebesar 78,01% yang masih memerlukan optimalisasi. Dari sisi anggaran, realisasi sebesar 89,77% dari pagu menunjukkan pelaksanaan program berjalan efisien dengan output kinerja yang tetap optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai efektif dan efisien, dengan sebagian besar indikator mencapai target dan dukungan penggunaan anggaran yang terkendali

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 1	Meningkatkannya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggula	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98,06	Menu njan/ ng	menandakan iklim investasi daerah sangat kondusif serta efektivitas pelayanan perizinan dan pengendalian investasi.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	n Daerah							
1.2. 5.1. 1.1	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH PROVIN SI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Provinsi	98,06	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100, 00	Men unja ng	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.1				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100, 00	Men unja ng	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.1. 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100, 00	Men unja ng	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.1. 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87,0 3	Men unja ng	pembayaran menyesuaikan realisasi kebutuhan pegawai atau pergeseran anggaran
1.2. 5.1. 1.1. 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100, 00	Men unja ng	Seluruh dokumen tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan, mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.1. 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100, 00	Men unja ng	eluruh dokumen tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan, mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.1. 3				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0	Tida k Men unja ng	Tidak terlaksana karena melalui mekanisme lain

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 1.1. 3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	Men unja ng	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.1. 4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	Men unja ng	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.1. 4				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	Tida k Men unja ng	Tidak terdapat realisasi kegiatan sehingga belum berkontribusi terhadap penguatan kepatuhan dan tata kelola
1.2. 5.1. 1.1. 5				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	Tida k Men unja ng	Kegiatan belum terlaksana sehingga belum mendukung perencanaan dan evaluasi berbasis data
1.2. 5.1. 1.1. 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	Men unja ng	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 1.1. 6				Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0	Tidak Menujangan	Tidak terdapat realisasi kegiatan sehingga belum mendukung keselarasan kebijakan dan program daerah dengan target pembangunan nasional.
1.2. 5.1. 1.1. 7				Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0	Tidak Menujangan	Kegiatan belum terlaksana sehingga belum berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
1.2. 5.1. 1.2				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	Menujangan	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.2. 1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100,00	Menujangan	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan
1.2. 5.1. 1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	Menujangan	mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan
1.2. 5.1. 1.3. 1				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Tidak Menujangan	Tidak terdapat realisasi kegiatan sehingga belum mendukung peningkatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kedisiplinan aparatur dan penguatan tata kelola internal perangkat daerah
1.2. 5.1. 1.3. 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Tidak Menunjukkan	Kegiatan belum terlaksana sehingga belum berkontribusi terhadap pemenuhan standar penampilan dan identitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan
1.2. 5.1. 1.3. 3				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Tidak Menunjukkan	Tidak terdapat peserta yang mengikuti kegiatan sehingga belum mendukung peningkatan kompetensi aparatur dalam penerapan regulasi serta penguatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
1.2. 5.1. 1.3. 4				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00	Menunjukkan	Mendukung akuntabilitas dan tata kelola keuangan.
1.2. 5.1. 1.3. 5				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Tidak Menunjukkan	Tidak terdapat realisasi kegiatan sehingga belum mendukung peningkatan pemahaman aparatur dan/atau pemangku kepentingan
1.2. 5.1. 1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	Menunjukkan	mendukung kelancaran operasional kantor.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 1.4. 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100, 00	Men unja ng	mendukung kelancaran operasional kantor.
1.2. 5.1. 1.4. 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100, 00	Men unja ng	mendukung kelancaran operasional kantor.
1.2. 5.1. 1.4. 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Tida k Men unja ng	tidak terdapat realisasi kegiatan sehingga belum mendukung kelancaran operasional perkantoran
1.2. 5.1. 1.4. 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100, 00	Men unja ng	Mendukung kelancaran operasional kantor.
1.2. 5.1. 1.4. 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100, 00	Men unja ng	Mendukung kelancaran operasional kantor
1.2. 5.1. 1.4. 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	100, 00	Men unja ng	Mendukung kelancaran operasional kantor
1.2. 5.1. 1.4. 7				Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	100, 00	Men unja ng	Mendukung kelancaran operasional kantor.
1.2. 5.1. 1.4. 8				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100, 00	Men unja ng	Mendukung kelancaran operasional kantor
1.2. 5.1. 1.4. 9				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	0	Tida k Men unja ng	idak terdapat realisasi kegiatan sehingga belum mendukung penguatan tata kelola

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD			pemerintahan berbasis digital
1.2. 5.1. 1.5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120,00	Men unja ng	Melebihi target karena kebutuhan operasional meningkat
1.2. 5.1. 1.5. 1				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100,00	Men unja ng	Melebihi target karena kebutuhan operasional meningkat
1.2. 5.1. 1.5. 2				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Tida k Men unja ng	Ditunda karena efisiensi
1.2. 5.1. 1.5. 3				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87,50	Men unja ng	Hampir tercapai, terdapat efisiensi atau penyesuaian kebutuhan
1.2. 5.1. 1.5. 4				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	100,00	Men unja ng	Kegiatan terealisasi optimal sehingga mendukung kelancaran operasional perkantoran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
1.2. 5.1. 1.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	Men unja ng	Realisasi penuh mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memperkuat tata kelola administrasi perangkat daerah
1.2. 5.1. 1.6. 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	Men unja ng	Mendukung kelancaran administrasi persuratan serta tertib administrasi pemerintahan yang akuntabel

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 1.6. 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100, 00	Men unja ng	Menjamin keberlangsungan operasional kantor sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas perangkat daerah
1.2. 5.1. 1.6. 3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100, 00	Men unja ng	Mendukung kelancaran pelayanan internal dan eksternal serta menunjang tata kelola pemerintahan yang tertib dan profesional
1.2. 5.1. 1.7				Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100, 00	Men unja ng	Mendukung pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara akuntabel dan berkelanjutan
1.2. 5.1. 1.7. 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaaa n, Biaya Pemeliharaaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100, 00	Men unja ng	Mendukung mobilitas operasional perangkat daerah serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan perizinan kendaraan dinas
1.2. 5.1. 1.7. 2				Pemeliharaaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100, 00	Men unja ng	Menjamin kesiapan sarana kerja sehingga mendukung efektivitas dan produktivitas pelaksanaan tugas
1.2. 5.1. 1.7. 3				Pemeliharaaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	100, 00	Men unja ng	Mendukung kelayakan sarana kerja dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang konduusif

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 1.7. 4				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	Men unja ng	Mendukung optimalisasi fungsi sarana dan prasarana gedung dalam menunjang pelayanan publik
1.2. 5.1. 1.7. 5				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Tida k Men unja ng	Tidak terdapat realisasi kegiatan sehingga belum mendukung optimalisasi
1.2. 5.1. 2	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162.13	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	218.15	Men unja ng	realisasi investasi yang mencapai 218,15% dari target menunjukkan kinerja sangat optimal dalam menarik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
1.2. 5.1. 2.1	PROGRAM PEMBANGUNAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	218.15	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	Tida k Men unja ng	Tidak ada penerbitan kebijakan baru pada periode berjalan
1.2. 5.1. 2.1. 1				Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	Tida k Men unja ng	Tidak ada penerbitan kebijakan baru pada periode berjalan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penanaman Modal				
1.2. 5.1. 2.1. 2				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	Tida k Men unja ng	Belum menjadi prioritas atau menunggu regulasi pusat
1.2. 5.1. 2.1. 3				Rekomendas i Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisa si Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	Tida k Men unja ng	Belum menjadi prioritas atau menunggu regulasi pusat
1.2. 5.1. 2.2				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	100, 00	Men unja ng	Dokumen tersedia dan menjadi dasar promosi investasi
1.2. 5.1. 2.2. 1				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0	Tida k Men unja ng	Efisiensi Anggaran, Dokumen tersedia dan menjadi dasar promosi investasi.
1.2. 5.1. 2.2. 2				Pemutakhira n data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0	Tida k Men unja ng	Dokumen tersedia dan menjadi dasar promosi investasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 3	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162,13	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	- 16,64	Men unja ng	Meskipun terjadi penurunan jumlah investor sebesar -16,64%, program tetap dikategorikan menunjang karena secara substantif berperan dalam menjaga keberlanjutan promosi investasi daerah
1.2. 5.1. 3.1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-16,64	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	80,00	Men unja ng	Hampir tercapai, terdapat penyesuaian kegiatan
1.2. 5.1. 3.1. 1				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	400,00	Men unja ng	Intensitas promosi meningkat signifikan untuk mendorong realisasi investasi
1.2. 5.1. 3.1. 2				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Provinsi	400,00	Men unja ng	Intensitas promosi meningkat signifikan untuk mendorong realisasi investasi
1.2. 5.1. 4	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162,13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	355,24	Men unja ng	Pelayanan perizinan sangat optimal dan melampaui target, menunjukkan sistem OSS-RBA berjalan efektif

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 4.1	PROGRA M PELAYA NAN PENANA MAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperole h Izin Sesuai Ketentuan	100.00	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100, 00	Men unja ng	Capaian 100% menunjukkan optimalnya fasilitasi dan koordinasi penanaman modal lintas kabupaten/kota
1.2. 5.1. 4.1. 1				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100, 00	Men unja ng	Tingginya permohonan izin menunjukkan kemudahan layanan
1.2. 5.1. 4.1. 2				Pemantauan , Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	22,0 0	Men unja ng	Pengawasan dan pendampingan berjalan aktif
1.2. 5.1. 4.1. 3				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	100, 00	Men unja ng	Realisasi yang sangat tinggi menunjukkan optimalnya layanan konsultasi perizinan berbasis risiko secara elektronik, yang berdampak pada peningkatan pemahaman pelaku usaha, percepatan proses perizinan, serta perbaikan iklim investasi daerah.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 4.2				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	Tidak Menujangan	Tidak terdapat realisasi dokumen penanaman modal kewenangan provinsi pada periode pelaporan
1.2. 5.1. 4.2. 1				Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	630.00	Menujangan	implementasi konsultasi perizinan berbasis risiko telah berjalan dan memberikan dukungan terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha serta percepatan proses perizinan
1.2. 5.1. 4.2. 2				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1386.00	Menujangan	Realisasi pelayanan sebanyak 1.386 menunjukkan layanan perizinan berusaha berbasis risiko telah dilaksanakan secara aktif dan mendukung kemudahan, kepastian, serta peningkatan kualitas pelayanan investasi di daerah
1.2. 5.1. 4.2. 3				Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Provinsi bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	22.00	Menujangan	Kegiatan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan namun capaian belum sesuai target

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2. 5.1. 5	Meningkatkannya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162.13	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100,00	Menunggu	Penyelesaian hambatan usaha sangat optimal dan berdampak langsung pada peningkatan realisasi investasi.
1.2. 5.1. 5.1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN	218,18	Menunggu	Melampaui target akibat percepatan realisasi proyek
1.2. 5.1. 5.1. 1				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	4,00	Menunggu	Pengawasan berjalan namun masih dapat ditingkatkan.
1.2. 5.1. 5.1. 2				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	977,27	Menunggu	Respons cepat terhadap permasalahan investor.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				merealisasikan Kegiatan Usahanya				
1.2. 5.1. 5.1. 3				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	Tidak Menjunjung	Tidak terlaksana karena efisiensi atau telah dilakukan secara daring/tidak terdata.
1.2. 5.1. 6	Meningkatkannya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan investasi PMA dan PMDN	162.13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	0	Tidak Menjunjung	Belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran, integrasi sistem belum optimal, atau penyesuaian kebijakan nasional
1.2. 5.1. 6.1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	0	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	0	Tidak Menjunjung	Belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran, integrasi sistem belum optimal, atau penyesuaian kebijakan nasional
1.2. 5.1. 6.1. 1				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	0	Tidak Menjunjung	Belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran, integrasi sistem belum optimal, atau penyesuaian kebijakan nasional.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menu njan/ Tidak Menu njang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Nilai AKIP	78,01				Menujangan	Kinerja akuntabilitas kategori baik dan menunjukkan konsistensi peningkatan tata kelola
1.3.3		Indeks Pelayanan Publik	100				Menujangan	Standar pelayanan publik terpenuhi optimal sesuai ketentuan.

Sumber : Olah Data DPMPTSP Prov. Sultra

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan dalam beberapa indikator bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sasaran *Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah* menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Hal ini tercermin dari tingginya realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melampaui target yang

ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi daerah relatif kondusif serta didukung oleh efektivitas kebijakan pelayanan dan fasilitasi penanaman modal. Peningkatan realisasi investasi ini tidak terlepas dari optimalisasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik, serta percepatan penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Program Pelayanan Penanaman Modal menunjukkan kinerja yang sangat baik, ditandai dengan tingginya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan perizinan telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Fasilitasi penanaman modal lintas daerah juga terlaksana secara optimal dan mendukung peningkatan realisasi investasi.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal juga memberikan kontribusi signifikan, khususnya dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaku usaha. Penyelesaian permasalahan investasi secara tepat waktu berimplikasi langsung terhadap peningkatan kepercayaan investor serta keberlanjutan kegiatan usaha di daerah.

Pada sisi lain, Program Promosi Penanaman Modal tetap berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan arus investasi, meskipun terdapat fluktuasi pada persentase peningkatan jumlah investor. Penurunan jumlah investor pada periode tertentu dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro dan dinamika pasar. Namun demikian, intensitas dan kualitas promosi tetap menjadi instrumen penting dalam memperluas jejaring dan peluang investasi.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal secara umum mendukung terciptanya kepastian berusaha. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebijakan, efisiensi anggaran, atau menunggu regulasi lebih lanjut, substansi program tetap relevan dalam mendukung daya saing daerah.

Di bidang tata kelola pemerintahan, capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan kategori “Baik” serta Indeks

Pelayanan Publik yang optimal menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Program penunjang urusan pemerintahan daerah berkontribusi dalam menjaga stabilitas administrasi, pengelolaan keuangan, serta kelancaran operasional perangkat daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun berjalan. Ketidaktercapaian tersebut umumnya disebabkan oleh efisiensi anggaran, penyesuaian kebijakan, pergeseran prioritas, maupun mekanisme pelaksanaan melalui skema lain. Kegiatan yang tidak terealisasi tersebut belum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja pada periode pelaporan.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan dapat dinilai efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan optimalisasi pelayanan perizinan berusaha. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan data dan sistem informasi investasi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kualitas promosi berbasis potensi unggulan daerah guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.573.971.888	8.514.598.381	88,93
1.2. 5.1. 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.941.900	175.120.637	97,86
1.2. 5.1. 1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.543.209.578	6.591.457.587	87,38
1.2. 5.1. 1.1. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.756.900	151.725.637	99,32
1.2. 5.1. 1.1. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.328.531.990	6.378.890.437	87,04
1.2. 5.1. 1.1. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.300.000	11.300.000	100,00
1.2. 5.1. 1.1. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.280.000	179.280.000	100,00
1.2. 5.1. 1.1. 3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	0	0	0
1.2. 5.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	10.760.000	9.025.000	83,88

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1. 3	Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.2. 5.1. 1.1. 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.885.000	12.095.000	81,26
1.2. 5.1. 1.1. 4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0
1.2. 5.1. 1.1. 5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0	0	0
1.2. 5.1. 1.1. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester n SKPD	24.637.588	24.262.150	98.48
1.2. 5.1. 1.1. 6	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0	0	0
1.2. 5.1. 1.1. 7	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1. 1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.219.700	2.450.000	76,09
1.2. 5.1. 1.2. 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.219.700	2.450.000	76,09
1.2. 5.1. 1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.300	3.833.350	76,66
1.2. 5.1. 1.3. 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0
1.2. 5.1. 1.3. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
1.2. 5.1. 1.3. 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0
1.2. 5.1. 1.3. 4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.300	3.833.350	76,66
1.2. 5.1. 1.3. 5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
1.2. 5.1. 1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.015.850	240.814.505	98,69
1.2. 5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi	603.750	0	0,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4. 1	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
1.2. 5.1. 1.4. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.2. 5.1. 1.4. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
1.2. 5.1. 1.4. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.056.600	6.022.000	99,43
1.2. 5.1. 1.4. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.615.000	24.134.750	90,68
1.2. 5.1. 1.4. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1.200.500	1.200.000	99,96
1.2. 5.1. 1.4. 7	Fasilitas Kunjungan Tamu	29.140.000	29.109.620	99,90
1.2. 5.1. 1.4. 8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.400.000	180.348.135	99,97
1.2. 5.1. 1.4. 9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1. 1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	780.218.842	774.378.863	99,25
1.2. 5.1. 1.5. 1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	570.000.000	569.889.000	99,98
1.2. 5.1. 1.5. 2	Pengadaan Mebel	0	0	0
1.2. 5.1. 1.5. 3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.480.450	69.480.450	100,00
1.2. 5.1. 1.5. 4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.738.392	135.009.413	95,93
1.2. 5.1. 1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.675.700	626.441.238	88,02
1.2. 5.1. 1.6. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	1.550.000	62,00
1.2. 5.1. 1.6. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.776.000	213.491.238	98,03
1.2. 5.1. 1.6. 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.399.700	411.400.000	83,72

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1. 1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.690.018	102.102.201	94,81
1.2. 5.1. 1.7. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.730.000	41.262.383	88,30
1.2. 5.1. 1.7. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000	2.955.000	96,89
1.2. 5.1. 1.7. 3	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.927.700	48.902.500	99,95
1.2. 5.1. 1.7. 4	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
1.2. 5.1. 1.7. 5	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.982.318	8.982.318	100,00
1.2. 5.1. 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1. 2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	0
1.2. 5.1. 2.1. 1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0
1.2. 5.1. 2.1. 2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	0	0	0
1.2. 5.1. 2.1. 3	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0	0	0
1.2. 5.1. 2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	0	0	0
1.2. 5.1. 2.2. 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	0	0	0
1.2. 5.1. 2.2. 2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1. 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	287.474.534	287.304.543	99,94
1.2. 5.1. 3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	287.474.534	287.304.543	99,94
1.2. 5.1. 3.1. 1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	265.020.000	265.000.000	99,99
1.2. 5.1. 3.1. 2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	22.454.534	22.304.543	99,33
1.2. 5.1. 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	478.036.210		
1.2. 5.1. 4.1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	478.036.210	463.550.050	96,97
1.2. 5.1. 4.1. 1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	93.018.110	78.902.410	84,82
1.2. 5.1. 4.1. 2	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang	148.985.000	148.863.317	99,92

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
1.2. 5.1. 4.1. 3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	236.033.100	235.784.323	99.89
1.2. 5.1. 4.2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	0
1.2. 5.1. 4.2. 1	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	0	0
1.2. 5.1. 4.2. 2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0	0
1.2. 5.1. 4.2. 3	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	0	0
1.2. 5.1. 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	166.387.300	164.150.000	98.66

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2. 5.1. 5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	166.387.300	164.150.000	98.66
1.2. 5.1. 5.1. 1	Pengawasan Penanaman Modal	14.339.400	13.011.700	90.74
1.2. 5.1. 5.1. 2	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	152.047.900	151.138.300	99.40
1.2. 5.1. 5.1. 3	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0	0	0
1.2. 5.1. 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	0	0
1.2. 5.1. 6.1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
1.2. 5.1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data	0	0	0

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.1. 1	dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			

Sumber : DPA Perubahan DPMPTSP Prov Sultra 2025

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel realisasi anggaran, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup optimal.

Program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp9.573.971.888 terealisasi Rp8.514.598.381 atau 88,93%. Realisasi ini menunjukkan bahwa fungsi administrasi dan operasional perangkat daerah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat efisiensi pada beberapa sub kegiatan.

Pada komponen administrasi keuangan perangkat daerah, realisasi mencapai 87,38%, dimana belanja terbesar terdapat pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan capaian 87,04%. Sementara itu, kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian hingga 97,86%, bahkan beberapa sub kegiatan mencapai 100%.

Administrasi umum perangkat daerah juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi 98,69%, termasuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan fasilitasi kunjungan tamu yang hampir terealisasi sempurna (di atas 99%). Pengadaan barang milik daerah bahkan mencapai 99,25%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan belanja modal.

Pada sisi pelayanan inti, Program Promosi Penanaman Modal terealisasi sebesar 99,94%, mencerminkan komitmen kuat dalam

mendukung peningkatan investasi daerah. Demikian pula Program Pelayanan Penanaman Modal mencatat realisasi sebesar 96,97%, terutama pada kegiatan pemantauan, evaluasi, dan layanan konsultasi perizinan berbasis risiko yang hampir mencapai 100%.

Selain itu, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar 98,66%, dengan kegiatan penyelesaian permasalahan pelaku usaha mencapai 99,40%, yang menunjukkan dukungan aktif pemerintah dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Adapun beberapa program seperti Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal belum memiliki alokasi anggaran pada tahun berjalan, sehingga tidak terdapat realisasi.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran pada tahun ini menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, terutama pada program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pengendalian investasi. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta penguatan iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara memiliki 3 sasaran strategis dengan 2 sasaran strategis tercapai dan 1 sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah keterbatasan alokasi anggaran pada sebagian program strategis penanaman modal, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang investasi dan perizinan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas

kabupaten/kota yang belum sepenuhnya optimal serta dinamika perubahan regulasi turut mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pencapaian target kinerja.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pada program strategis penanaman modal agar lebih fokus pada pencapaian indikator kinerja utama.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis di bidang investasi serta perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pengendalian penanaman modal.
4. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi serta data potensi investasi daerah secara lebih akurat dan mutakhir.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan agar lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis digital.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran.
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal :18 Februari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**



Ir. MUHAMMAD NURJAYA, S.T., M.T., IPU
Permbina Utama Muda Gol. IV/c
NIP, 19670106 199703 1 004C

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi PMA dan PMDN	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	22.5 Triliun
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD DPMPTSP	BB
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik PTSP	A (-)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000.000,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	1.155.000.000,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	807.138.000,-
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	168.585.800,-
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.186.982.537,-
Jumlah		11.367.706.337,-

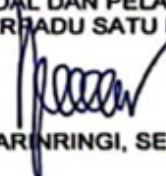
Kendari, 1 Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



MAYJEN TNI (Purn.) ANDI SUMANGERUKKA

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



PARINRINGI, SE, M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD DPMPTSP	BB
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik PTSP	A (-)


Program	Kegiatan	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	191.445.200,-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	58.917.099,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.745.000,-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.267.706.336,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	179.280.000,-
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.760.000,-
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan, Triwulan dan semesteran	30.250.000,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.499.750,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.316.000,-

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	5.250.000.-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000.-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.424.999.-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.998.000.-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.540.000.-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000.-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	650.000.000.-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.000.000.-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.813.512.-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000.-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.471.738.-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.119.700.-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.950.000.-
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.370.000.-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	30.125.200.-
JUMLAH			8.793.795.3558.-

Kendari, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



PARINRINGI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip. 19771014 200312 1 007

Pihak Pertama



H. JONI FAJAR, S. Sos., M. AB
Pembina Tk. I. Gol. IV/b
Nip. 19730628 199902 1 002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parinringi, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MAYJEN TNI (Purn.) ANDI SUMANGERUKKA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Kendari, 1 November 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

TTD

MAYJEN TNI (Purn.) ANDI SUMANGERUKKA

PARINRINGI, SE., M.Si.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp 13,28 Triliun

No.	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.573.971.888,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	287.474.534,00
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	478.036.210,00
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	166.387.300,00
Jumlah		10.505.869.932,00

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TTD

MAYJEN TNI (Purn.) ANDI SUMANGERUKKA

Kendari, 1 November 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**


PARINRINGI, SE., M.Si.

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU selama 5 tahun

Tabel 4.2. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				9.942.16 5.916		21.499.5 32.632		22.477.5 32.632		22.677.5 32.632		23.055.5 32.632		23.255.5 32.632	
Terpenuhinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	76,32%	81,58%	9.975.16 5.914	84,21%	21.499.5 32.632	92,11%	22.477.5 32.632	94,74%	22.677.5 32.632	97,37%	23.055.5 32.632	100,00%	23.255.5 32.632	SEKR ETAR IS/PP TK
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				158.244. 900		2.688.53 5.227		2.815.24 9.161		2.573.99 2.902		2.350.87 6.826		2.139.36 9.731	
Tersedianya dokumen perencanaan, pengangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	17 Dokumen	158.244. 900	19 Dokumen	2.688.53 5.227	19 Dokumen	2.815.24 9.161	19 Dokumen	2.573.99 2.902	19 Dokumen	2.350.87 6.826	19 Dokumen	2.139.36 9.731	PERE NCA NA

Tabel 4.2. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPSTSP Prov. Sultra Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				9.942.16 5.916		21.499.5 32.632		22.477.5 32.632		22.677.5 32.632		23.055.5 32.632		23.255.5 32.632	
Terpenuhinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	76,32%	81,58%	9.975.16 5.914	84,21%	21.499.5 32.632	92,11%	22.477.5 32.632	94,74%	22.677.5 32.632	97,37%	23.055.5 32.632	100,00%	23.255.5 32.632	SEKR ETAR IS/PP TK
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				158.244. 900		2.688.53 5.227		2.815.24 9.161		2.573.99 2.902		2.350.87 6.826		2.139.36 9.731	
Tersedianya dokumen perencanaan, pengangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	17 Dokumen	158.244. 900	19 Dokumen	2.688.53 5.227	19 Dokumen	2.815.24 9.161	19 Dokumen	2.573.99 2.902	19 Dokumen	2.350.87 6.826	19 Dokumen	2.139.36 9.731	PERE NCA NA



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	132.059.900	5 Dokumen	512.052.171	5 Dokumen	530.154.176	5 Dokumen	495.688.992	5 Dokumen	463.815.265	5 Dokumen	433.599.960	PERE NCA NA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	11.300.000	3 Dokumen	367.709.926	3 Dokumen	385.811.916	3 Dokumen	351.346.746	3 Dokumen	319.473.020	3 Dokumen	289.257.720	PERE NCA NA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	358.279.926	3 Dokumen	376.381.916	3 Dokumen	341.916.735	3 Dokumen	310.043.009	3 Dokumen	279.827.720	PERE NCA NA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6 Laporan	14.885.000	5 Laporan	356.653.426	5 Laporan	374.755.405	5 Laporan	340.290.224	5 Laporan	308.416.505	5 Laporan	278.201.204	PERE NCA NA



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	3 Data	343.279.926	3 Data	361.381.916	3 Data	326.916.735	3 Data	295.043.009	3 Data	264.827.709	PERE NCA NA
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	-	-	1 Berita Acara	360.279.926	1 Berita Acara	378.381.916	1 Berita Acara	343.916.735	1 Berita Acara	312.043.009	1 Berita Acara	281.827.709	PERE NCA NA
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	-	-	1 Substansi	390.279.926	1 Substansi	408.381.916	1 Substansi	373.916.735	1 Substansi	342.043.009	1 Substansi	311.827.709	PERE NCA NA



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.105.597.182		11.486.267.241		12.536.115.874		13.473.439.889		14.528.648.199		15.708.760.535	
Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Dokumen	37 Dokumen	8.105.597.182	38 Dokumen	11.486.267.241	38 Dokumen	12.536.115.874	38 Dokumen	13.473.439.889	38 Dokumen	14.528.648.199	38 Dokumen	15.708.760.535	KEU ANG AN/B END AHA RA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/Bulan	113 Orang/Bulan	7.896.819.182	111 Orang/Bulan	9.774.406.726	111 Orang/Bulan	10.751.847.399	110 Orang/Bulan	11.827.032.138	108 Orang/Bulan	13.009.735.352	102 Orang/Bulan	14.310.708.888	KEU ANG AN/B END AHA RA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	179.280.000	12 Dokumen	497.126.256	12 Dokumen	515.228.246	12 Dokumen	480.763.065	12 Dokumen	448.889.339	12 Dokumen	418.674.039	KEU ANG AN/B END AHA RA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.760.000	1 Laporan	311.754.256	1 Laporan	329.856.246	1 Laporan	295.391.065	1 Laporan	263.517.339	1 Laporan	233.302.039	KEU ANG AN/B END AHA RA
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	582.449.947	1 Dokumen	600.551.937	1 Dokumen	566.086.756	1 Dokumen	534.213.030	1 Dokumen	503.997.730	KEU ANG AN/B END AHA RA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
	Lanjut Pemeriksaan														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.738.000	12 Laporan	320.530.056	12 Laporan	338.632.046	12 Laporan	304.166.865	12 Laporan	272.293.139	12 Laporan	242.077.839	KEU ANG AN/ B E N D A H A R A
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.219.700		3.541.670		3.895.837		4.285.421		4.713.963		5.185.359	
Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.219.700	1 Dokumen	3.541.670	1 Dokumen	3.895.837	1 Dokumen	4.285.421	1 Dokumen	4.713.963	1 Dokumen	5.185.359	PERE NCA NA/ P E N G U R U S B A R A N G
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.219.700	1 Dokumen	3.541.670	1 Dokumen	3.895.837	1 Dokumen	4.285.421	1 Dokumen	4.713.963	1 Dokumen	5.185.359	PERE NCA NA/ P E N G U R U S B A R A N G
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.300		2.136.099.080		1.765.967.780		1.587.572.237		1.491.951.059		1.401.305.159	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Tersedianya kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14 Dokumen	1 Dokumen	5.000.300	7 Dokumen	2.136.099.080	5 Dokumen	1.765.967.780	7 Dokumen	1.587.572.237	9 Dokumen	1.491.951.059	9 Dokumen	1.401.305.159	KASU BAG UMU M & KEPEGAWAIAN /PPTK
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	3 Unit	499.437.270	-	-	-	-	-	-	-	-	KASU BAG UMU M & KEPEGAWAIAN
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	-	-	2 Paket	633.037.270	2 Paket	651.139.260	2 Paket	616.674.079	2 Paket	584.800.353	2 Paket	554.585.053	KASU BAG UMU M & KEPEGAWAIAN /PPTK
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1 Orang	5.000.300	5 Orang	519.437.270	10 Orang	537.539.260	15 Orang	503.074.079	20 Orang	471.200.353	20 Orang	440.985.053	KASU BAG UMU M & KEPEGAWAIAN
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	50 Orang	484.187.270	50 Orang	502.289.260	50 Orang	467.824.079	50 Orang	435.950.353	50 Orang	405.735.053	KASU BAG UMU M & KEPEGAWAIAN



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	50 Orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	KASU BAG UMUM & KEPE GAWAJIAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah				207.823.350	289.176.760		261.269.436		322.324.630		314.036.018		339.439.619		
Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	103 Dokumen	45 Dokumen	207.823.350	48 Dokumen	289.176.760	46 Dokumen	261.269.436	47 Dokumen	322.324.630	46 Dokumen	314.036.018	45 Dokumen	339.439.619	KASU BAG UMUM & KEPE GAWAJIAN /PPTK
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1.071.750	1 Paket	5.000.000	2 Paket	10.000.000	1 Paket	5.000.000	2 Paket	10.000.000	1 Paket	5.000.000	KASU BAG UMUM & KEPE GAWAJIAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	30.750.000	-	-	2 Paket	40.928.250	-	-	-	-	KASU BAG UMUM & KEPE GAWAJIAN /PPTK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	-	-	1 Paket	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	KASU BAG UMUM &



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
	yang Disediakan														KEPE GAW AIAN /PPTK
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.056.600	2 Paket	6.662.260	2 Paket	7.328.486	2 Paket	8.061.335	2 Paket	8.867.468	2 Paket	9.754.215	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN /PPTK
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	21.650.000	3 Paket	23.815.000	3 Paket	26.196.500	3 Paket	28.816.150	3 Paket	31.697.765	3 Paket	34.867.542	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN /PPTK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen	1.505.000	14 Dokumen	1.655.500	14 Dokumen	1.821.050	14 Dokumen	2.003.155	14 Dokumen	2.203.471	14 Dokumen	2.423.818	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	27.540.000	12 Laporan	30.294.000	12 Laporan	33.323.400	12 Laporan	36.655.740	12 Laporan	40.321.314	12 Laporan	44.353.445	KASU BAG UMU M & KEPE GAW AIAN



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	181.500.000	12 Laporan	199.650.000	12 Laporan	219.615.000	12 Laporan	241.576.500	SEKR ETAR IS
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.100.000	1 Dokumen	1.210.000	1 Dokumen	1.331.000	1 Dokumen	1.464.100	KASU BAG UMUM & KEPE GAW ALAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				782.963.512		2.271.767.887		2.344.175.847		2.206.315.123		2.078.820.219		1.586.492.980	
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	782.963.512	4 Dokumen	2.271.767.887	4 Dokumen	2.344.175.847	4 Dokumen	2.206.315.123	4 Dokumen	2.078.820.219	4 Dokumen	1.586.492.980	SEKR ETAR IS/PP TK
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	1 Unit	570.000.000	4 Unit	419.918.256	4 Unit	438.020.246	4 Unit	403.555.065	4 Unit	371.681.339	4 Unit	341.466.039	PEJA BAT PENG ADA AN/PTK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	-	-	1 Paket	449.918.256	1 Paket	468.020.246	1 Paket	433.555.065	1 Paket	401.681.339	-	-	PEJABAT PENGADAAN/PTK
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	8 Unit	80.150.000	43 Unit	955.918.256	5 Unit	974.020.246	5 Unit	939.555.065	5 Unit	907.681.339	5 Unit	877.466.039	PEJABAT PENGADAAN/PTK
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	132.813.512	1 Unit	446.013.119	1 Unit	464.115.109	1 Unit	429.649.928	1 Unit	397.776.202	1 Unit	367.560.902	PEJABAT PENGADAAN/PTK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				594.001.772		1.366.251.137		1.402.455.117		1.333.524.755		1.269.777.303		1.209.346.703	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	594.001.772	9 Dokumen	1.366.251.137	9 Dokumen	1.402.455.117	9 Dokumen	1.333.524.755	9 Dokumen	1.269.777.303	9 Dokumen	1.209.346.703	SEKRETARIS
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.400.000	KASUBAG UMUM & KEPENGAWAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	216.982.072	3 Laporan	734.142.902	3 Laporan	752.244.892	3 Laporan	717.779.711	3 Laporan	685.905.985	3 Laporan	655.690.685	KASU BAG UMUM & KEPE GAWAIAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	373.019.700	4 Laporan	627.708.235	4 Laporan	645.810.225	4 Laporan	611.345.044	4 Laporan	579.471.318	4 Laporan	549.256.018	KASU BAG UMUM & KEPE GAWAIAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.315.200		1.257.893.630		1.348.403.580		1.176.077.675		1.016.709.045		865.632.545	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	85.315.200	5 Dokumen	1.257.893.630	5 Dokumen	1.348.403.580	5 Dokumen	1.176.077.675	5 Dokumen	1.016.709.045	5 Dokumen	865.632.545	SEKR ETAR IS/PP TK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15 Unit	51.530.000	16 Unit	277.492.382	20 Unit	295.594.372	24 Unit	261.129.191	28 Unit	229.255.465	32 Unit	199.040.165	KASU BAG UMUM & KEPE GAWAIAN /PPTK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	23 Unit	3.660.000	23 Unit	224.835.382	23 Unit	242.937.372	23 Unit	208.472.191	23 Unit	176.598.465	23 Unit	146.383.165	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.125.200	1 Unit	253.947.102	1 Unit	272.049.092	1 Unit	237.583.911	1 Unit	205.710.185	1 Unit	175.494.885	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	1 Unit	250.809.382	1 Unit	268.911.372	1 Unit	234.446.191	1 Unit	202.572.465	1 Unit	172.357.165	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	1 Unit	250.809.382	1 Unit	268.911.372	1 Unit	234.446.191	1 Unit	202.572.465	1 Unit	172.357.165	KASU BAG UMUM & KEPEGAWAIAN/PPTK
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				50.000.000		710.000.000		176.000.000		171.000.000		199.100.000		196.410.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	-23,05%	20,18%	50.000.000	20,18%	710.000.000	20,18%	176.000.000	20,18%	171.000.000	20,18%	199.100.000	20,18%	196.410.000	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL/PP TK
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						410.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
Ditetapkannya pemberian fasilitas/insentif dibiidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Dokumen	-	-	3 Dokumen	410.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	121.000.000	2 Dokumen	133.100.000	2 Dokumen	146.410.000	ANALIS KEBIJAKAN/PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	-	-	-	1 Dokumen	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	ANALIS KEBIJAKAN/PENATA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
	Penanaman Modal														KELOLA PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000	ANALISIS KEBIJAKAN/PELATIHAN KELOLA PENANAMAN MODAL
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	73.205.000	ANALISIS KEBIJAKAN/PELATIHAN KELOLA PENANAMAN MODAL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				50.000.000		300.000.000		66.000.000		50.000.000		66.000.000	-	50.000.000	
Tersedianya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	-	50.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	66.000.000	3 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	66.000.000		50.000.000	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL/PERANATA KOMPUTER
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL/PERANATA KOMPUTER
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	-	-	-	3 Daerah	50.000.000	4 Daerah	66.000.000	3 Daerah	50.000.000	4 Daerah	66.000.000	3 Daerah	50.000.000	PENATA KELOLA PENANAMAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
															AN MOD AL/P RAN ATA KOM PUTE R
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				288.528. 000		300.000. 000		150.000. 000		150.000. 000		150.000. 000		150.000. 000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	25,53%	40,21%	288.528. 000	40,21%	300.000. 000	40,21%	150.000. 000	40,21%	150.000. 000	40,21%	150.000. 000	40,21%	150.000. 000	PENA TA KELO LA PENA NAM AN MOD AL/PP TK
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				288.528. 000		300.000. 000		150.000. 000		150.000. 000		150.000. 000		150.000. 000	
Terselenggaranya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4 Dokumen	2 Dokumen	288.528. 000	2 Dokumen	300.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	1 Dokumen	150.000. 000	PRAN ATA HUM AS/P RAN ATA KOM PUTE R/AN ALIS

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
															KEBIJAKA N/PE NAT A KELO LA PENAN AMAN MOD AL
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	265.020.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	PRAN ATAHUM AS/P RAN ATA KOM PUTE R
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	1 Dokumen	23.508.000	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	ANA LIS KEBIJAKA N/PE NAT A KELO LA PENAN AMAN MOD AL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				480.036.210		460.000.000		560.000.000		660.000.000		760.000.000		860.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-32,34%	25,59%	480.036.210	25,59%	460.000.000	25,59%	560.000.000	25,59%	660.000.000	25,59%	760.000.000	25,59%	860.000.000	PENATA PERIZINAN/PPTK
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				480.036.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	480.036.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENANANAN
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	93.018.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENANANAN



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	-	3 Dokumen	460.000.000	3 Dokumen	560.000.000	3 Dokumen	660.000.000	3 Dokumen	760.000.000	3 Dokumen	860.000.000	PENATA PERIZINAN
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	10 Pelaku Usaha	25.000.000	10 Pelaku Usaha	25.000.000	10 Pelaku Usaha	25.000.000	10 Pelaku Usaha	25.000.000	10 Pelaku Usaha	25.000.000	PENATA PERIZINAN
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	120 Pelaku Usaha	35.000.000	120 Pelaku Usaha	35.000.000	120 Pelaku Usaha	35.000.000	120 Pelaku Usaha	35.000.000	120 Pelaku Usaha	35.000.000	PENATA PERIZINAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Provinsi bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		-	-	-	80 Kegiatan Usaha	400.000. 000	100 Kegiatan Usaha	500.000. 000	120 Kegiatan Usaha	600.000. 000	140 Kegiatan Usaha	700.000. 000	160 Kegiatan Usaha	800.000. 000	PENA TA PERI ZINA N
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				169.337. 300		1.649.98 6.000		1.814.98 4.600		1.996.48 3.060		2.196.13 1.366		2.415.74 4.503	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100%	100%	169.337. 300	100%	1.649.98 6.000	100%	1.814.98 4.600	100%	1.996.48 3.060	100%	2.196.13 1.366	100%	2.415.74 4.503	PENA TA KELO LA PENA NAM AN MOD AL/PP TK
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				169.337. 300		1.649.98 6.000		1.814.98 4.600		1.996.48 3.060		2.196.13 1.366		2.415.74 4.502	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN	11,05 Triliun	13,28 Triliun	169.337. 300	15,96 Triliun	1.649.98 6.000	19,18 Triliun	1.814.98 4.600	23,05 Triliun	1.996.48 3.060	27,70 Triliun	2.196.13 1.366	33,29 Triliun	2.415.74 4.503	PENA TA KELO LA PENA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
															NAM AN MOD AL/PP TK
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	21 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	14.289.400	55 Kegiatan Usaha	616.807.000	60 Kegiatan Usaha	678.487.700	67 Kegiatan Usaha	746.336.470	73 Kegiatan Usaha	820.970.117	81 Kegiatan Usaha	903.067.129	PENA TA KELO LA PENA NAM AN MOD AL/A NALI S KEBU AKA N
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	19 Kegiatan Usaha	22 Kegiatan Usaha	155.047.900	24 Kegiatan Usaha	228.880.000	27 Kegiatan Usaha	251.768.000	30 Kegiatan Usaha	276.944.800	32 Kegiatan Usaha	304.639.280	35 Kegiatan Usaha	335.103.208	PENA TA PENA NAM AN MOD AL/A NALI S KEBU AKA N

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	453 Pelaku Usaha	-	-	100 Pelaku Usaha	804.299.000	110 Pelaku Usaha	884.728.900	121 Pelaku Usaha	973.201.790	133 Pelaku Usaha	1.070.521.969	146 Pelaku Usaha	1.177.574.165	PENATA NAMA AN MODAL/ ANALIS KEBIJAKA N/PRANA TA KOMPUTER
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	-	15,50%	10.000.000	15,50%	11.000.000	15,50%	12.100.000	15,50%	13.310.000	13%	14.641.000	PENATA PERIZINA N/PPTK	
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
Terlaksananya pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	1 Dokumen	10.000.0 00	1 Dokumen	11.000.0 00	1 Dokumen	12.100.0 00	1 Dokumen	13.310.0 00	1 Dokumen	14.641.0 00	PENA TA PERI ZINA N/ AN ALIS KEBU JAKA N/ PPT K
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	-	1 Dokumen	10.000.0 00	1 Dokumen	11.000.0 00	1 Dokumen	12.100.0 00	1 Dokumen	13.310.0 00	1 Dokumen	14.641.0 00	PENA TA PERI ZINA N/ AN ALIS KEBU JAKA N

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah

Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari Inspektorat



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.7/308/IRBAN I/2025
TANGGAL : 8 OKTOBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Bumi Praja Anduonohu (0401) 3135361 Kendari 93232

Kendari, 8 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.7 / 308 / IRBAN I / 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2025

Kepada

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara**

di

Kendari

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP dapat memberikan simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan, dengan kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Keterangan
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan nilai **70,05** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dalam kategori **"Sangat Baik"**, yaitu terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,57	21,30
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,47	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,40	12,15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi		75,94	70,05
	Tingkat akuntabilitas Kinerja		"BB"	"BB"

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,



Dr. Intan Nurcahya, S.P., M.Si., CGCAE.
Pembina Tk. I, Gol IV/b
NIP. 19740128 200212 2 006

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tenggara.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) oleh APIP Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/427/2024 Tanggal 11 Juli 2025 untuk Melakukan Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
6. Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Nomor 800.1.11.1/484/2024 Tanggal 31 Juli 2025 untuk Melakukan Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lanjutan).

B. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu bentuk sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
2. Wawancara; dan
3. Konfirmasi.

F. Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh sumber daya manusia yang relatif cukup memadai. Jumlah tenaga yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2025 adalah 49 orang yang terdiri dari 1 pejabat tinggi Pratama, 5 pejabat administrator, 3 pejabat pengawas, dan sisanya adalah staff yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selama Tahun 2023 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan terarah dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Secara umum, komponen keberadaan instrumen SAKIP telah terpenuhi dengan cukup baik; kualitas dokumen menunjukkan konsistensi terhadap pedoman yang berlaku; dan kebermanfaatan hasil evaluasi mulai dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja, terutama dalam peningkatan efektivitas pelayanan perizinan dan promosi investasi di daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan nilai sebesar **75,94** termaksud ke dalam Kategori **BB**, yang diinterpretasikan **Sangat Baik** dalam pengelolaan kinerjanya.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Adapun tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya (2023) yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun indikator kinerja dalam jangka 5 tahun, melakukan review dan evaluasi tahunan indikator kinerja;
- 2) Melakukan sesi konsultasi dengan pihak terkait, memastikan seluruh cascading diverifikasi oleh tim evaluasi;
- 3) Membuat peta hubungan kinerja antar bidang (pohon kerja/cascading, mengintegrasikan strategi dan kebijakan antar bidang, menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin untuk memastikan keselarasan perencanaan kinerja;
- 4) Menyusun format standar untuk dokumen RENSTRA dan IKU, melakukan review berkala terhadap dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya;
- 5) Memanfaatkan pengelolaan aplikasi manajemen kinerja, melatih staf mengenai penggunaan aplikasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin menggunakan aplikasi, memastikan data kinerja yang dikumpulkan akurat dan relevan;
- 6) Menyusun kebijakan rolling pegawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja, melakukan rolling pegawai sesuai kebijakan, menyelenggarakan rapat evaluasi setelah rolling pegawai, mendokumentasikan hasil rapat dan tindakan perbaikan yang diambil; dan
- 7) Meminta revidi dari APIP secara berkala, menyusun laporan hasil revidi, memastikan semua rekomendasi dari APIP ditindaklanjuti, menyimpan dokumen revidi dan surat pernyataan di arsip yang mudah diakses.

BAB II HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan nilai **70,05** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dalam kategori **"Sangat Baik"**, yaitu terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke eselon 3/koordinator.

Nilai tersebut juga mengindikasikan bahwa perangkat manajemen kinerja seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi telah berfungsi dengan sangat baik, meskipun masih diperlukan penguatan komitmen, konsistensi, dan keselarasan antar-komponen agar capaian kinerja lebih optimal.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,57	21,30
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,47	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,40	12,15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi		75,94	70,05
	Tingkat akuntabilitas Kinerja		"BB"	"BB"

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) yang memperoleh nilai 75,94 (predikat BB), Pada tahun 2024 terdapat penurunan nilai sebesar 5,89 poin. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pelaksanaan manajemen kinerja, khususnya pada aspek perencanaan kinerja (turun dari 25,57 menjadi 21,30), aspek pengukuran kinerja (dari 20,47 menjadi 18,60), pelaporan kinerja (dari 12,40 menurun

menjadi 12,15), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (dari 17,50 meningkat menjadi 18,00). Meskipun demikian, capaian predikat "BB" masih menempatkan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada kategori implementasi akuntabilitas kinerja yang sangat baik.

Secara keseluruhan, nilai 70,05 dengan predikat "BB" menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada fase penguatan kualitas manajemen kinerja dan tata kelola akuntabilitas yang berkelanjutan. Untuk mencapai kategori "A", diperlukan penguatan pada konsistensi indikator antar dokumen, optimalisasi penggunaan hasil pengukuran dalam penyesuaian strategi dan kebijakan, serta peningkatan kapasitas evaluasi internal berbasis teknologi informasi. Dengan langkah tersebut, diharapkan DPMPTSP dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang sepenuhnya adaptif, efisien, dan berorientasi hasil pada periode evaluasi berikutnya.

Adapun Rincian per komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	21,30	71,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	100,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,3	70,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	9	60,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	18,60	62,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,2	70,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	5,4	60,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9	60,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,15	81,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,1	70,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	90,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang	7,50	6	80,00%

- kinerja (*komponen outcome dan output*) dengan IKU dalam Renja;
- c) Dokumen *Crosscutting* yang dibuat belum nampak menjelaskan keterkaitan, hubungan, dan koordinasi kinerja antar berbagai bidang atau fungsi dalam suatu organisasi atau program untuk mencapai tujuan yang sama, kemudian irisan/irisan lintas urusan atau lintas OPD yang saling terkait dalam mencapai satu tujuan/sasaran juga belum nampak;
 - d) Masih terdapat substansi kegiatan diantara Dokumen DPA dan RENJA yang belum selaras;
 - e) Pada dokumen Rencana Aksi, waktu dimulainya dan berakhirnya kegiatan dan lamanya waktu pelaksanaan masih perlu dilogiskan untuk mencapai Target Kinerja;
 - f) Pada dokumen Rencana Aksi khususnya pada item kegiatan "Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi", belum ada rencana pelaksanaan dan ketersediaan laporan monitoringnya;
 - g) Laporan Kinerja (LKJIP) belum dilakukan evaluasi internal atau revidi oleh inspektorat daerah; dan
 - h) Belum terdapat ikhtisar saran/rekomendasi teknis dari hasil evaluasi/revidi terhadap dokumen RENSTRA, RKT, PERJANJIAN KINERJA, dan RENCANA AKSI.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya telah melaksanakan pengukuran kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil pengukuran telah dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a) Belum terdapat pedoman internal tentang pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- b) Belum terdapat sistematika pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja minimal memuat; Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawabnya, serta jadwal monev.
- c) Belum terdapat pedoman internal tentang pengukuran dan pengumpulan

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
	besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,00	72,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	70,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	70,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,05	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya telah melaksanakan perencanaan kinerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a) Dokumen perencanaan kinerja belum maksimal memenuhi standar ukuran kinerja yang *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Berbatas Waktu) khususnya pada kriteria *Time Bound*, Dokumen perencanaan kinerja belum terjadwal secara detail batas waktu realisasi program;
- b) Dokumen Pohon Kinerja/Cascading belum tertera level jabatan, belum menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF), belum menjabarkan keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi terutama IKU ke 2 (*Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemda*) dan IKU Ke 3 (*Meningkatnya kualitas pelayanan Publik PTSP*), belum konsisten dengan IKU yang tertera di Renja, belum selarasnya indikator

- kinerja (*komponen outcome dan output*) dengan IKU dalam Renja;
- c) Dokumen *Crosscutting* yang dibuat belum nampak menjelaskan keterkaitan, hubungan, dan koordinasi kinerja antar berbagai bidang atau fungsi dalam suatu organisasi atau program untuk mencapai tujuan yang sama, kemudian irisan/irisan lintas urusan atau lintas OPD yang saling terkait dalam mencapai satu tujuan/sasaran juga belum nampak;
 - d) Masih terdapat substansi kegiatan diantara Dokumen DPA dan RENJA yang belum selaras;
 - e) Pada dokumen Rencana Aksi, waktu dimulainya dan berakhirnya kegiatan dan lamanya waktu pelaksanaan masih perlu dilogiskan untuk mencapai Target Kinerja;
 - f) Pada dokumen Rencana Aksi khususnya pada item kegiatan "Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi", belum ada rencana pelaksanaan dan ketersediaan laporan monitoringnya;
 - g) Laporan Kinerja (LKJIP) belum dilakukan evaluasi internal atau reuiu oleh inspektorat daerah; dan
 - h) Belum terdapat ikhtisar saran/rekomendasi teknis dari hasil evaluasi/reuiu terhadap dokumen RENSTRA, RKT, PERJANJIAN KINERJA, dan RENCANA AKSI.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya telah melaksanakan pengukuran kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil pengukuran telah dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a) Belum terdapat pedoman internal tentang pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
- b) Belum terdapat sistematika pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja minimal memuat; Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, Pengukuran Kinerja dan penanggungjawabnya, serta jadwal monev.
- c) Belum terdapat pedoman internal tentang pengukuran dan pengumpulan

data kinerja yang telah final dan formal berupa SK/SE

- d) Formula pengukuran/perhitungan capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) belum & tidak dijelaskan di LAKIP /LKJIP
- e) Pada formula pengukuran/perhitungan kinerja terhadap IKU (*Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN*), formula pengukuran kinerjanya relevan untuk mengukur pertumbuhan investasi antar tahun, bukan nilai absolut investasi. Jika indikator utamanya adalah "nilai realisasi" (jumlah investasi dalam rupiah), seharusnya yang dipakai adalah angka total investasi, bukan pertumbuhan persentase;
- f) Target & realisasi Sasaran/Indikator pertriwulan tidak dijelaskan pada LKJIP;
- g) Pada dokumen monitoring RENCANA Aksi masih terdapat substansi kegiatan yang tidak sinkron dengan laporan realisasi di LKJIP, kemudian beberapa item kegiatan triwulan terdapat target namun ada realisasinya;
- h) Belum tersedia media pemantauan secara khusus yang mengukur, memantau capaian Kinerja /*Key Performance Indikator* (KPI) individu Pejabat Administrator dan Pengawas DPMPTSP pertriwulan;
- i) Belum terdapat metode pengumpulan data kinerja yang menggunakan teknologi informasi yang sifatnya aplikasi khusus;
- j) Dokumen Renja-Perubahan belum menjelaskan perubahan strategi - strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja; dan
- k) Pengukuran kinerja masih belum optimal dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya telah melaksanakan pelaporan kinerja seperti yang telah dimuat dalam Laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil laporan telah dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a) Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) belum direviu, belum terdapat dokumen bukti LKjIP telah di reviu APIP Inspektorat;
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan, tidak terdapat bukti dukung/ media atensi pimpinan baik dalam bentuk nota dinas, notulen rapat dan dokumen relevan lainnya yang menunjukkan tindak lanjut masing-masing point-perpoint rekomendasi perbaikan kinerja (Evaluasi mandiri) dalam LAKIP;
- c) LKJ per triwulan tersedia, namun tidak menjelaskan hasil evaluasi dan strategi perbaikan serta penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) LKJ per triwulan tersedia, namun belum terdapat bukti digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja berikutnya; dan
- e) Informasi dalam laporan kinerja belum optimal digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi/tahun anggaran berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja, namun masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

- a) Telah dilakukan evaluasi AKIP (Mandiri) internal namun belum optimal dilaksanakan pada seluruh komponen (Tingkat Administrator/Eselon III dan Pengawas/Eselon IV) Unit Kerja/Satuan Kerja DPMPTSP;
- b) LHE mandiri AKIP Masih kurang lengkap utamanya terkait: (1) Rancangan Desain Evaluasi ; (2) Pemilihan Metode dan Teknik evaluasi; (3) Pemilihan Instrumen dan Alat;
- c) Belum tersedia Aplikasi khusus untuk pengumpulan dan pengklasifikasian data internal & eksternal untuk keperluan evaluasi AKIP;

- d) Matriks laporan hasil tindak lanjut evaluasi AKIP 2023 yang dilaksanakan di tahun 2024 perlu di dukung evidence based, serta menjelaskan output hasil perbaikan terhadap indikator kinerja utama yang terpengaruh.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan catatan implementasi akuntabilitas kinerja pada seluruh komponen penilaian baik pada tahun berjalan dan melanjutkan perbaikan tahun sebelumnya untuk meningkatkan perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2) Menyempurnakan cascading agar dapat secara spesifik menggambarkan pola crosscutting atau kolaborasi kinerja antar bidang untuk mewujudkan kinerja organisasi;
- 3) Memastikan bahwa rumusan kinerja telah selaras menjawab isu strategis dan mandat unit kerja;
- 4) Melakukan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa dokumen perencanaan level PD seluruhnya telah selaras, yaitu kinerja dan indikator kinerja pada Renstra, IKU, RKT dan PK telah selaras dan terjaga ketepatan level pengampu kinerjanya;
- 5) Memastikan bahwa dokumen IKU Pemda dan PD mengawal kinerja utama, serta telah menyajikan rumus perhitungan, sumber data dan penanggung jawab data. Kemudian memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum di dalam dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya, sehingga data kinerja yang dihasilkan andal dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran/kinerja;
- 6) Menyempurnakan mekanisme pengukuran kinerja berkala agar menghasilkan informasi yang memadai terkait capaian kinerja level strategis dan level individu;
- 7) Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja pada level Pemda dan PD dengan kedalaman informasi yang memadai. Selain itu, agar memastikan bahwa kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja sudah selaras dengan PK dan mengacu pada tata cara penyampaian kinerja pada

Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu kami juga memberikan rekomendasi teknis dalam menjawab hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

- a) Susun *timeframe* terperinci pada dokumen perencanaan (RENSTRA, RKT, Rencana Aksi) dengan milestone bulanan/triwulan, sehingga batas waktu pencapaian target lebih terukur.
- b) Perbaiki pohon kinerja/cashcading dengan mencantumkan level jabatan, menambahkan critical success factor (CSF), serta memastikan konsistensi IKU di RENSTRA, Renja, dan Rencana Aksi.
- c) Crosscutting belum jelas, Integrasikan dokumen *crosscutting* dengan memetakan irisan kinerja antar bidang/OPD menggunakan matriks lintas urusan, sehingga sinergi pencapaian sasaran dapat terbaca.
- d) Bentuk tim harmonisasi perencanaan untuk melakukan review sinkronisasi DPA-Renja sebelum penetapan final.
- e) Rencana Aksi belum logis waktunya, Lakukan critical path analysis agar durasi kegiatan lebih realistis dengan target kinerja tahunan.
- f) Item kegiatan peta potensi investasi belum jelas, Tambahkan rencana pelaksanaan detail (timeline, penanggung jawab, output) dan pastikan ada laporan monitoring sebagai bukti realisasi.
- g) LKJIP belum direviu Inspektorat, Tetapkan mekanisme rewiu wajib oleh APIP minimal sekali setahun dengan surat pernyataan atau berita acara hasil rewiu.
- h) Tambahkan lampiran khusus yang merangkum rekomendasi teknis dari hasil evaluasi/rewiu masing-masing dokumen RENSTRA, RKT, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

- a) Belum ada pedoman pengukuran kinerja internal formal, Segera susun SK Kepala Dinas tentang pedoman pengukuran & pengumpulan data

- kinerja yang memuat dasar, tujuan, proses bisnis, indikator, mekanisme monitoring, serta jadwal evaluasi;
- b) Revisi formula IKU "nilai realisasi investasi" menjadi pengukuran nilai absolut investasi (rupiah), bukan persentase pertumbuhan. Gunakan persentase hanya untuk indikator turunan;
- c) Tambahkan tabel target dan realisasi capaian per triwulan di LKJIP agar monitoring lebih akurat;
- d) Terapkan aplikasi monitoring berbasis dashboard yang terhubung ke laporan realisasi sehingga tidak terjadi inkonsistensi;
- e) Buat instrumen key performance indicator (KPI) per pejabat administrator & pengawas dengan pemantauan per triwulan;
- f) Belum ada aplikasi TI khusus , Kembangkan aplikasi sederhana (misal berbasis excel-database atau web internal) untuk pengumpulan data kinerja secara otomatis;
- g) Renja-Perubahan belum menjelaskan strategi, Tambahkan bab khusus analisis strategi pada dokumen Renja-Perubahan yang menjelaskan pergeseran kebijakan/program dan anggaran; dan
- h) Integrasikan capaian kinerja individu dan unit kerja sebagai dasar pemberian insentif, promosi, atau pembinaan.

3) Pelaporan Kinerja

- a) LKJIP belum direviu Inspektorat, Tetapkan SOP harus reviu LKJIP oleh Inspektorat sebelum penyampaian ke KemenPAN-RB;
- b) Tidak ada bukti atensi pimpinan , Buat mekanisme disposisi formal (nota dinas atau berita acara rapat pimpinan) sebagai bukti tindak lanjut atas laporan kinerja;
- c) LKJ triwulan belum jelaskan strategi perbaikan & penggunaan anggaran, Tambahkan analisis capaian, kendala, strategi korektif, dan implikasi anggaran pada setiap LKJ triwulan; dan
- d) Laporan belum dipakai untuk perencanaan berikutnya, Wajibkan integrasi rekomendasi LKJIP ke penyusunan RENJA tahun berikutnya melalui matriks *lesson learned*.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi AKIP sebagai hasil atas penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Pt. Inspektur,



Dr. Intan Murcahya, SP.,M.Si., CGCAE.
Pembina Tk. I.,Gol. IV/b
NIP 19740128 200212 2 006

Lampiran: KKE Rekap

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		21,3
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6
	Kriteria Keberadaan:		100,00	
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		100,00	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		100,00	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		100,00	
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		100,00	
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		100,00	
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		100,00	
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	6,3
	Kriteria Kualitas:		88,69	
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		100,00	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		100,00	
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		100,00	
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		100,00	
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		80,00	
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		100,00	
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		100,00	

	8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		66,67	
	9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		66,67	
	10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		62,22	
	11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		100,00	
	1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	CC	9
		Kriteria Pemanfaatan:		72,88	
	1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		100,00	
	2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		100,00	
	3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		63,00	
	4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		80,00	
	5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		50,00	
	6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		0,00	
	7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		100,00	
	8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		90,00	
	2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		18,6
	2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	B	4,2
		Kriteria Keberadaan:		83,33	
	1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		50,00	
	2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		100,00	

	3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		100,00	
	2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	CC	5,4
		Kriteria Kualitas:		73,01	
	1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		100,00	
	2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		66.67	
	3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		41.67	
	4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		66.07	
	5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		80.00	
	6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		66.67	
	7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		90.00	
	2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	CC	9
		Kriteria Pemanfaatan:		53,93	
	1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		75.00	
	2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		0.00	
	3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		0.00	
	4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		0.00	
	5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		100.00	
	6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		100.00	

	7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		100.00	
	8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		100.00	
	9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		64.29	
	10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		0.00	
3	PELAPORAN KINERJA		15,00		12,15
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja		3,00	B	2,1
	Kriteria Keberadaan:			83.33	
	1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		100.00	
	2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		100.00	
	3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		100.00	
	4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		0.00	
	5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		100.00	
	6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		100.00	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya		4,50	A	4,05
	Kriteria Kualitas:			100.00	
	1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		100,00	
	2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		100,00	
	3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		100,00	
	4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		100,00	
	5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		100,00	
	6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		100,00	

	7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya.		100,00	
	8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		100,00	
	9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		100,00	
3.c		Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6
		Kriteria Pemanfaatan:		93,08	
	1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		100.00	
	2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		78.13	
	3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		100.00	
	4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		100.00	
	5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		100.00	
	6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		100.00	
	7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		73.42	
4		EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		18
4.a		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4
		Kriteria Keberadaan:		91,67	
	1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		100.00	
	2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		75.00	
	3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		100.00	

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
	Kriteria Kualitas:		100,00	
	1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		100,00	
	2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		100,00	
	3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		100,00	
	4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		100,00	
	5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		100,00	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
	Kriteria Pemanfaatan:		83,23	
	1 Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		100,00	
	2 Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.		73,28	
	3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		100,00	
	4 Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		85,71	
	5 Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		57,14	

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada)

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1 (Jika ada).

MATRIKS LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP 2024 YANG DILAKSANAKAN DI TAHUN 2025

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI/TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROSES PENYELESAIAN
1.	Memperhatikan catatan implementasi akuntabilitas kinerja pada seluruh komponen penilaian baik pada tahun berjalan dan melanjutkan perbaikan tahun sebelumnya untuk meningkatkan perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;	Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan terhadap seluruh catatan hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja pada setiap komponen penilaian SAKIP, serta menyusun langkah perbaikan manajemen kinerja secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan peningkatan kualitas tata kelola kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah.	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai
2.	Menyempumakan cascading agar dapat secara spesifik menggambarkan pola crosscutting atau kolaborasi kinerja antar bidang untuk mewujudkan kinerja organisasi;	Melakukan penyempurnaan pohon kinerja dan cascading kinerja dengan memperjelas keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, serta kontribusi lintas bidang melalui penyusunan matriks crosscutting yang menggambarkan kolaborasi kinerja antar unit organisasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terpadu.	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai

3.	Memastikan bahwa rumusan kinerja telah selaras menjawab isu strategis dan mandat unit kerja	Melaksanakan reviu komprehensif terhadap rumusan sasaran dan indikator kinerja agar selaras dengan isu strategis daerah, mandat organisasi, serta arah kebijakan pembangunan, disertai proses validasi melalui forum internal guna memastikan relevansi, keterukuran, dan orientasi hasil (outcome).	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai
4.	Melakukan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa dokumen perencanaan level PD seluruhnya telah selaras, yaitu kinerja dan indikator kinerja pada Renstra, IKU, RKT dan PK telah selaras dan terjaga ketepatan level pengampu kinerjanya;	Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan kinerja meliputi Renstra, IKU, RKT, dan Perjanjian Kinerja dengan memastikan konsistensi sasaran, indikator, target, serta kesesuaian level pengampu kinerja, melalui mekanisme reviu internal dan pengendalian kualitas dokumen secara berjenjang.	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai
5.	Memastikan bahwa dokumen IKU Pemda dan PD mengawal kinerja utama, serta telah menyajikan rumus perhitungan, sumber data dan penanggung jawab data.	Melakukan penyempurnaan dokumen Indikator Kinerja Utama dengan melengkapi rumus perhitungan, definisi operasional, sumber data, serta penanggung jawab	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Selesai

	Kemudian memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum di dalam dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya, sehingga data kinerja yang dihasilkan andal dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran/kinerja	pengelolaan data kinerja, serta memastikan kesesuaian formula dengan substansi indikator guna menghasilkan data kinerja yang valid, andal, dan akuntabel.	Pintu Prov. Sultra		Pintu Prov. Sultra	
6.	Menyempurnakan mekanisme pengukuran kinerja berkala agar menghasilkan informasi yang memadai terkait capaian kinerja level strategis dan level individu;	Menyusun dan menetapkan pedoman pengukuran kinerja internal yang mengatur proses pengumpulan data, mekanisme verifikasi, jadwal monitoring berkala, serta integrasi capaian kinerja level strategis dan individu sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai
7.	Menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja pada level Pemda dan PD dengan kedalaman informasi yang memadai. Selain itu, agar memastikan bahwa kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja sudah selaras dengan PK dan mengacu pada tata cara penyampaian kinerja pada	Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja pada level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan memperdalam analisis capaian, efisiensi penggunaan sumber daya, kendala pelaksanaan, serta strategi perbaikan kinerja, serta memastikan	Seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Triwulan 1,2,3 dan 4	Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra	Selesai

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun n (Jika Ada)



**JUARA III SATU DATA AWARD TAHUN 2025
KATEGORI
"KUALITAS DATA PERANGKAT DAERAH"**



**ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
SULAWESI TENGGARA 2025
KATEGORI BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROV. SULTRA
SEBAGAI BADAN PUBLIK
“MENUJU INFORMATIF”**



SERTIFIKAT
NOMOR N800.1.12.8/E.114/BAK
KEPADA DPMPTSP PROVINSI SULAWESI TENGGARA (209095)
DENGAN INDIKATOR KINERJA [PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
TAHUN ANGGARAN 2024 SATUAN KERJA DEKONSENTRASI
"TERBAIK KEEMPAT (97,98)"